

IDENTIFIKASI SEKTOR EKONOMI UNGGULAN DI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA

Abu Bakar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jembatan Bulan Timika
Email: stie@stiejb.ac.id

ABSTRACT

The aims of this research are: (1) analyze the growth classification of economic sectors in the Mimika Regency; (2) analyze the basic sector of the economy in the Mimika Regency; (3) analyzing the share and shifts in the economy sector Mimika Regency. This study uses secondary data obtained from BPS-Statistics Papua Province, BPS-Statistics Mimika, and Department of Planning and Regional Development Mimika. Data were analyzed using analysis Klassen Typology, Location Quotient, and Shift-Share analysis. The results of this research show that: (1) Sector classified as an developed sector in the Mimika Regency is Electricity and Gas sector, sector of Accommodation, Food and Beverages. (2) Sectors is a basic sector in Mimika is the sector of Agriculture, Forestry and Fishery, sector of Electricity and Gas, sector Water, Waste Management, cesspit and recycling, Construction sector, the sector of Wholesale and Retail trade, Cars and Motorcycles Reparations, sectors Transportation and Warehousing, sector of Accommodation, Food and Beverages, sector Information and Communications, Fnance and insurance sector, Real Estate, Public administration, defense, and compulsory social security, and sector Other Services. (3) The sectors that have competitive advantages (D) in Mimika are sectors of Manufacturing industry, Electricity and Gas sector, sector of Accommodation, food and beverages. (4) By combining the results of the analysis Klassen Typology, Location Quotient, and Shift Share, then the sectors which are the leading sectors in the Mimika Regency is the Electricity and Gas sector, sector of Accommodation, food and beverages.

Keyword: Leading Economic Sectors, Growth Classification Of Economic Sectors, Basic Sector, Share And Shifts In The Economy Sector.

PENDAHULUAN

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pemerintah dan

masyarakatnya harus bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah beserta partisipasi masyarakatnya dan dengan menggunakan setiap sumberdaya

yang ada harus mampu menaksir potensi setiap sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian daerah.

Kabupaten Mimika di Provinsi Papua yang lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1996 sebagai Kabupaten Administratif, yang kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 menjadi Kabupaten Otonom, kini pembangunannya sedang gencar dilakukan. Gencarnya pembangunan yang dilakukan karena Kabupaten Mimika berpotensi menjadi daerah penyangga bagi kabupaten lainnya di wilayah pegunungan dan pantai di kawasan selatan dan timur Provinsi Papua. Dengan didukung dengan sarana dan prasarana transportasi seperti Bandara Internasional Moses Kilangin dan Pelabuhan Pomako menyebabkan aksesibilitas yang semakin terbuka. Hal ini kian meningkatkan mobilitas penduduk dan barang/jasa ke Kabupaten Mimika.

Kabupaten Mimika yang memiliki letak yang begitu strategis dan potensi wilayah yang memadai menyebabkan kebijakan pembangunan daerah ini tidak dapat secara langsung mengadopsi kebijakan daerah lain, provinsi maupun nasional. Kebijakan yang diambil haruslah sesuai dengan potensi yang ada, kebutuhan, dan masalah yang dihadapi oleh daerah. Oleh karena itu pengidentifikasian terhadap potensi ekonomi daerah sangat penting untuk dilakukan.

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai PDRB Kabupaten Mimika selama periode 2011-2015 sangat berfluktuasi. Naik turunnya nilai PDRB Kabupaten Mimika ini disebabkan oleh naik turunnya nilai tambah produksi barang dan jasa pada sektor Pertambangan dan Penggalian yang merupakan sektor dengan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Mimika. Selama periode 2011-2015, kontribusi sektor ini terus mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini menurun dari 88,52 persen di tahun 2011 menjadi 83,88 persen di tahun 2015 (BPS Kabupaten Mimika, 2016). Jika tanpa memasukan sektor Pertambangan dan Penggalian, maka kontribusi sektor ekonomi yang terbesar dalam membentuk PDRB Kabupaten Mimika adalah sektor Konstruksi dengan kontribusi sebesar 16,76 persen di tahun 2011, dan meningkat menjadi 18,13 persen pada tahun 2015 (BPS Kabupaten Mimika, 2016). Jika ditinjau dari laju pertumbuhan riil PDRB Kabupaten Mimika, pada tahun 2015 sektor dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor Konstruksi sebesar 11,86 persen (BPS Kabupaten Mimika, 2016).

Dengan makin cenderung menurunnya kontribusi dan laju pertumbuhan sektor Pertambangan dan Penggalian dalam PDRB Kabupaten Mimika, maka Kabupaten Mimika perlu

mengubah paradigma pembangunan ekonomi yang dipimpin sektor Pertambangan dan Penggalian menjadi sektor lain yang mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Pengembangan sektor unggulan di luar sektor Pertambangan dan Penggalian di Kabupaten Mimika merupakan upaya mutlak yang harus dilakukan dalam pencapaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika. Untuk itu, analisis dalam penelitian ini akan mengeluarkan sektor Pertambangan dan Penggalian dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi sektor-sektor unggulan lain di Kabupaten Mimika.

TINJAUAN PUSTAKA

Sektor Unggulan

Pengertian sektor unggulan biasanya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan oleh wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik (Lantemona, Kalangi dan Naukoko, 2014).

Ada empat syarat agar suatu sektor tertentu menjadi sektor

prioritas (Rachbini, 2001:54), yakni: (1) sektor tersebut harus menghasilkan produk yang mempunyai permintaan yang cukup besar, sehingga laju pertumbuhan berkembang cepat akibat dari efek permintaan tersebut; (2) karena ada perubahan teknologi yang teradopsi secara kreatif, maka fungsi produksi baru bergeser dengan pengembangan kapasitas yang lebih luas; (3) harus terjadi peningkatan investasi kembali dari hasil-hasil produksi sektor yang menjadi prioritas tersebut, baik swasta maupun pemerintah; (4) sektor tersebut harus berkembang, sehingga mampu memberi pengaruh terhadap sektor-sektor lainnya.

Konsep Pembangunan Ekonomi

Pembangunan ekonomi memiliki pengertian yang sangat luas. Secara tradisional pembangunan dipandang sebagai suatu fenomena ekonomi yang diukur berdasarkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Persepektif mengenai tujuan dan makna pembangunan kemudian berkembang menjadi lebih luas lagi. Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu kehidupan yang serba lebih baik secara material

maupun spiritual. Oleh karena itu, indikator pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan PDRB maupun PDRB perkapita, tetapi juga indikator lainnya seperti ketenagakerjaan, pendidikan, distribusi pendapatan, dan jumlah penduduk miskin. Hal ini sesuai dengan paradigma pembangunan modern yang mulai mengedepankan pengentasan kemiskinan, penurunan ketimpangan distribusi pendapatan, serta penurunan tingkat pengangguran (Todaro dan Smith, 2006:103).

Pembangunan ekonomi dapat didefinisikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan suatu negara dalam rangka mengembangkan kegiatan ekonomi dan taraf hidup masyarakatnya. Dengan adanya batasan tersebut, maka pembangunan ekonomi pada umumnya dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan (Arsyad, 2010:11).

Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan ekonomi mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinyu; (2) Usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita; (3) Peningkatan pendapatan perkapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang; dan (4) Perbaikan sistem

kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya).

Konsep Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan kegiatan ekonomi. Perekonomian suatu negara dianggap berhasil atau tidak dalam program pembangunan dinilai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis pembangunan suatu negara atau daerah. Pengejaran pertumbuhan merupakan tema sentral dalam kehidupan ekonomi semua negara di dunia dewasa ini (Todaro, 2000: 136).

Pertumbuhan ekonomi secara sederhana dapat dimaknai sebagai pertambahan output atau pendapatan nasional keseluruhan dalam kurun waktu tertentu (Prasetyo dalam Pujoalwanto, 2014:15). Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai syarat dalam pembangunan.

Menurut Simon Kuznets dalam M.L Jhingan (2012:57) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, yang terwujud dengan adanya kenaikan output nasional secara terus-menerus

yang disertai dengan kemajuan teknologi serta adanya penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi yang dibutuhkannya. Definisi Kuznets menekankan bagaimana kapasitas suatu negara (daerah) dalam memaksimalkan mesin produksinya untuk mencapai output yang maksimal.

Ahli-ahli ekonomi telah lama memandang beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi (Sukirno, 2009:423), antara lain:

1. Tanah dan kekayaan alam lainnya.

Kekayaan alam suatu negara meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, jumlah dan jenis hasil hutan dan hasil laut yang dapat diperoleh, jumlah dan jenis kekayaan barang tambang yang terdapat. Kekayaan alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara, terutama pada masa-masa permulaan dari proses pertumbuhan ekonomi. Dalam setiap negara dimana pertumbuhan ekonomi baru bermula terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi di luar sektor primer yaitu sektor dimana kekayaan alam terdapat kekurangan modal, kekurangan tenaga ahli dan kekurangan pengetahuan para pengusaha untuk mengembangkan kegiatan ekonomi modern di satu pihak,

dan terbatasnya pasar bagi berbagai jenis barang kegiatan ekonomi di lain pihak, sehingga membatasi kemungkinan untuk mengembangkan berbagai jenis kegiatan ekonomi.

Apabila negara tersebut mempunyai kekayaan alam yang dapat diusahakan dengan menguntungkan, hambatan yang baru saja dijelaskan akan dapat diatasi dan pertumbuhan ekonomi dipercepat kemungkinannya untuk memperoleh keuntungan tersebut dan menarik pengusaha-pengusaha dari negara-negara atau daerah-daerah yang lebih maju untuk mengindahkan kekayaan alam tersebut. Modal yang cukup, teknologi, dan teknik produksi yang modern, dan tenaga-tenaga ahli yang dibawa oleh pengusaha-pengusaha tersebut dari luar memungkinkan kekayaan alam itu diusahakan secara efisien dan menguntungkan.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari waktu ke waktu dapat menjadi pendorong maupun penghambat kepada perkembangan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja, dan penambahan tersebut memungkinkan negara itu menambah produksi. Disamping itu sebagai akibat

pendidikan, latihan dan pengalaman kerja, keterampilan penduduk akan bertambah tinggi.

Akibat buruk dari pertambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi dapat terjadi ketika jumlah penduduk tidak sebanding dengan faktor-faktor produksi lain yang tersedia. Ini berarti penambahan penggunaan tenaga kerja tidak akan menimbulkan pertambahan dalam tingkat produksi atau pun kalau bertambah, pertambahan tersebut akan lambat sekali dan tidak mengimbangi pertambahan jumlah penduduk.

3. Barang-barang modal dan tingkat teknologi
Barang-barang modal penting dalam meningkatkan keefisienan pertumbuhan ekonomi. Pada masa kini pertumbuhan ekonomi dunia telah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu jauh lebih modern daripada kemajuan yang dicapai oleh suatu masyarakat yang masih belum berkembang. Apabila barang-barang modal saja bertambah sedangkan tingkat teknologi tidak mengalami perkembangan, kemajuan yang akan dicapai adalah jauh lebih rendah daripada yang dicapai pada masa kini. Tanpa adanya perkembangan teknologi, produktivitas barang-barang modal tidak akan mengalami perubahan dan tetap berada

pada tingkat yang sangat rendah. Oleh karena itu pendapatan perkapita hanya mengalami perkembangan yang sangat kecil.

Kemajuan ekonomi yang berlaku di berbagai negara terutama ditimbulkan oleh kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi menimbulkan beberapa efek positif dalam pertumbuhan ekonomi, dan oleh karenanya pertumbuhan ekonomi menjadi lebih pesat. Efek yang utama adalah:

- a. Kemajuan teknologi dapat mempertinggi keefisienan kegiatan memproduksi sesuatu barang. Kemajuan seperti itu akan menurunkan biaya produksi dan meninggikan jumlah produksi.
 - b. Kemajuan teknologi menimbulkan penemuan barang-barang baru yang belum pernah diproduksi sebelumnya. Kemajuan seperti itu menambah barang dan jasa yang dapat digunakan masyarakat.
 - c. Kemajuan teknologi dapat meninggikan mutu barang-barang yang diproduksi tanpa meningkatkan harga.
4. Sistem sosial dan sikap masyarakat
Sistem sosial dan sikap masyarakat penting dalam peranannya dalam

mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Di dalam menganalisis masalah-masalah pembangunan di negara-negara berkembang, ahli-ahli ekonomi telah menunjukkan bahwa sistem sosial dan sikap masyarakat dapat menjadi penghambat yang serius kepada pembangunan. Adat-istiadat yang tradisional dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan cara memproduksi yang modern dan produktivitas yang tinggi. Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipercepat. Pertumbuhan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan peningkatan kemampuan produksi pada daerah tersebut. Dalam kegiatan perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan fisik produksi barang dan jasa yang berlaku disuatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal.

Teori Basis Ekonomi

Teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan

jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk kemudian diekspor, sehingga akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja baru (Arsyad, 2010:376).

Menurut Hover dalam Nikijuluw (2013), pertumbuhan beberapa sektor basis akan menentukan pembangunan daerah secara keseluruhan, sementara berkembangnya sektor nonbasis hanya merupakan konsekuensi-konsekuensi dari pembangunan daerah. Dalam teori basis ekonomi menganggap bahwa perekonomian regional dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor basis dan sektor nonbasis. Sektor basis merupakan sektor yang melakukan aktifitas berorientasi ekspor keluar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, atau dengan kata lain sektor basis adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah karena mempunyai keuntungan komparatif dan keuntungan kompetitif yang cukup tinggi. Sedangkan sektor nonbasis adalah kegiatan yang menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan, ruang lingkup produksinya dan pemasarannya adalah bersifat lokal, hanya untuk mencukupi kebutuhan daerah tersebut tanpa melakukan ekspor.

Menurut Richardson dalam Adisasmita (2005:28), analisis

basis ekonomi adalah berkenaan dengan identifikasi pendapatan basis. Bertambah banyaknya kegiatan basis dalam suatu wilayah akan menambah arus pendapatan ke dalam wilayah yang bersangkutan, selanjutnya menambah permintaan terhadap barang dan jasa di dalam wilayah tersebut, sehingga pada akhirnya akan menimbulkan kenaikan volume kegiatan non basis.

Dalam Sjafrizal (2008: 87), model basis mula-mula diperkenalkan oleh Douglas C. North. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah ditentukan oleh keuntungan komparatif yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Bila daerah yang bersangkutan dapat mendorong pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan komparatif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan ditingkatkan.

Strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi ekonomi yang muncul berdasarkan teori ini adalah penekanan terhadap arti penting bantuan (*aid*) kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasi kebijakannya mencakup pengurangan hambatan/batasan terhadap perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor yang ada dan akan didirikan di daerah tersebut.

Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah terdapat beberapa analisis yang digunakan, antara lain:

a. Metode Langsung

Metode langsung dapat digunakan dengan survei langsung kepada pelaku usaha ke mana mereka memasarkan barang yang diproduksi dan dari mana mereka membeli bahan-bahan kebutuhan untuk menghasilkan produk tersebut. Dari jawaban yang diberikan, dapat ditentukan berapa persen produk yang dijual ke luar wilayah dan berapa persen yang dipasarkan di dalam wilayah. Hal yang sama juga dilakukan untuk bahan baku yang mereka gunakan. Untuk kepentingan analisis, perlu diketahui jumlah orang yang bekerja dan berapa nilai tambah yang diciptakan oleh kegiatan usaha tersebut.

b. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung dapat dilakukan dengan menggunakan asumsi atau disebut metode asumsi. Dalam metode asumsi, berdasarkan kondisi wilayah tersebut (berdasarkan data sekunder), ada kegiatan tertentu yang diasumsikan sebagai kegiatan basis dan kegiatan lainnya sebagai kegiatan nonbasis. Kegiatan yang mayoritas produknya dijual ke luar wilayah atau mayoritas uang masuknya berasal dari luar wilayah langsung dianggap basis, sedangkan yang mayoritas produknya dipasarkan lokal dianggap nonbasis.

c. Metode Campuran

Suatu wilayah yang sudah berkembang, cukup banyak

usaha yang tercampur antara kegiatan basis dan kegiatan nonbasis. Penggunaan metode asumsi murni akan memberikan kesalahan yang besar. Akan tetapi, penggunaan metode langsung yang murni juga cukup berat, yang sering dilakukan adalah gabungan antara metode asumsi dengan metode langsung yang disebut metode campuran. Dalam metode campuran diadakan survei pendahuluan, yaitu pengumpulan data sekunder, biasanya dari instansi pemerintah atau lembaga pengumpul data seperti BPS. Dari data sekunder berdasarkan analisis ditentukan kegiatan mana yang dianggap basis dan yang nonbasis. Asumsi apabila 70% atau lebih produknya diperkirakan dijual ke luar wilayah maka kegiatan itu langsung dianggap basis. Sebaliknya, apabila 70% atau lebih produknya dipasarkan di tingkat lokal maka langsung dianggap nonbasis. Untuk menentukan porsi tersebut, harus dilakukan survei dan harus ditentukan sektor mana yang surveinya cukup dengan pengumpulan data sekunder dan sektor mana yang mungkin membutuhkan sampling pengumpulan data langsung dari pelaku usaha. Jadi, untuk suatu wilayah yang ekonominya terbuka dan kegiatannya cukup beragam, tidak mungkin hanya menggunakan metode asumsi saja tetapi haruslah gabungan

antara metode asumsi dan metode langsung.

d. Metode *Location Quotients*

Metode *Location Quotients* merupakan suatu alat yang dapat digunakan dengan mudah, cepat, dan tepat. Karena kesederhanaannya, teknik *Location Quotient* dapat dihitung berulang kali dengan menggunakan berbagai perubahan acuan dan periode waktu. Analisis *Location Quotient* dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan merumuskan komposisi sektor-sektor basis suatu wilayah dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai indikator pertumbuhan wilayah.

Teori Perubahan Struktural

Teori perubahan struktural membahas perubahan ekonomi suatu negara sedang berkembang, dengan sifat awal yang subsisten pada sektor pertanian berubah atau berkembang menuju struktur perekonomian yang modern (Kuncoro, 2003:59)

a. Teori Boeke: Dualisme Sosial

Pengertian dualisme sosial mula-mula dicetuskan oleh Boeke yang menyatakan bahwa dalam suatu masyarakat mungkin terdapat dua sistem sosial yang sangat berbeda. Kedua-duanya terwujud secara berdampingan dimana yang satu tidak dapat sepenuhnya menguasai yang lainnya. Sistem sosial yang lebih modern terutama berasal dari negara-negara barat, dan

berkembang di suatu negara sebagai akibat dari perkembangan penjajahan dan perdagangan luar negeri sejak berabad-abad. Penetrasi dari sistem sosial yang baru ini menyebabkan kegiatan cara berpikir segolongan masyarakat adalah sama dengan yang terdapat di negara-negara yang sudah lebih maju. Akan tetapi sebagian besar masyarakat lainnya dengan sistem sosialnya mengalami perubahan yang sangat minimal sekali, sehingga keadaan yang terwujud setelah penetrasi tersebut tidak banyak berubah jika dibandingkan dengan keadaan pada masa sebelumnya. Berdasarkan pada keadaan yang demikian, Boeke mengemukakan teorinya dualisme sosial di negara-negara berkembang dan pengertian tersebut didefinisikan sebagai suatu pertentangan dari suatu sistem sosial yang dari luar (asing) dengan sistem sosial pribumi yang memiliki corak yang berbeda.

Dalam masyarakat yang demikian, agar dapat memulai pembangunannya menuntut kesabaran untuk menunggu evolusi sosial sampai tahap dimana masyarakat tersebut sudah siap untuk cara-cara produksi modern (Subandi, 2008:51).

- b. Teori Pembangunan Arthur Lewis: Dualisme Ekonomi
Teori ini pada dasarnya membahas proses

pembangunan yang terjadi antara daerah perkotaan dan pedesaan, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan termasuk juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada.

Pokok permasalahan yang dikaji Lewis mengasumsikan bahwa dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua struktur perekonomian, yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian modern (Subandi, 2008:52).

- c. Hollis Chenery: Teori Pola Pembangunan

Analisis teori ini memfokuskan pada perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian beralih ke sektor industri.

Dalam proses transformasi struktural tidak berarti semua berjalan mulus. Hal ini tentunya ada konsekuensi yang harus dipikul oleh masyarakat, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Salah satu sisi negatifnya adalah meningkatnya arus urbanisasi sejalan dengan kemajuan industrilisasi. Industrilisasi dan urbanisasi

pada beberapa hal justru menghambat proses pemerataan hasil pembangunan. Transformasi struktural akan berjalan baik jika diikuti pemerataan kesempatan belajar, penurunan laju pertumbuhan penduduk, penurunan derajat dualisme ekonomi antara desa dan kota. Jika hal tersebut dipenuhi maka proses transformasi struktural akan diikuti oleh peningkatan pendapatan dan pemerataan pendapatan secara simultan (Subandi, 2008:55).

d. Teori Harrod-Domar: Akumulasi Modal

Teori ini dikembangkan pada waktu yang hampir bersamaan oleh Roy F. Harrod (1948) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Teori ini didasarkan atas asumsi :

- 1) Perekonomian bersifat tertutup,
- 2) Hasrat menabung ($MPS = s$) adalah konstan,
- 3) Proses produksi memiliki koefisien yang tetap, serta
- 4) Tingkat pertumbuhan angkatan kerja (n) adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Atas dasar asumsi-asumsi tersebut, Harrod-Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut (Subandi, 2008:57):

$$g = k = n$$

Dimana :

- $g = growth$ (tingkat pertumbuhan output)
 $k = capital$ (tingkat pertumbuhan modal)
 $n = tingkat pertumbuhan angkatan kerja$

RANCANGAN PENELITIAN

Daerah dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Mimika yang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua. Objek penelitian ini adalah identifikasi sektor ekonomi unggulan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi adalah cara untuk memperoleh data atau informasi mengenai berbagai hal yang ada kaitannya dengan penelitian, dengan jalan melihat kembali laporan-laporan tertulis, baik berupa angka maupun keterangan. Selain data-data laporan tertulis, untuk kepentingan penelitian ini juga digali berbagai data, informasi dan referensi dari berbagai sumber pustaka, media massa dan internet.

Model dan Metode Analisis Data

Untuk mencapai tujuan serta menjawab permasalahan yang telah ditetapkan, maka digunakan tiga macam metode analisis data, yaitu:

1. Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan salah satu alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui gambaran tentang klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Mimika yang dikaitkan dengan perekonomian Provinsi Papua. Variabel yang dijadikan alat analisis ini adalah laju pertumbuhan dan kontribusi dari masing-masing sektor di Kabupaten Mimika dan Provinsi Papua.

Analisis Tipologi Klassen membagi klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi menjadi empat bagian (Sjafrizal, 2008:180), yaitu:

- a. Sektor Maju dan Tumbuh Pesat (*Developed Sector*), dimana memiliki laju pertumbuhan dalam PDRB lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, serta memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.
- b. Sektor Maju Tapi Tertekan (*Stagnant Sector*), dimana memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih kecil dibandingkan laju

pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih besar dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

- c. Sektor Potensial atau masih dapat Berkembang (*Developing Sector*), dimana memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, tetapi memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.
- d. Sektor Relatif Tertinggal (*Underdeveloped Sector*), dimana memiliki laju pertumbuhan PDRB lebih kecil dibandingkan laju pertumbuhan PDRB daerah yang menjadi referensi, serta memiliki nilai kontribusi sektor terhadap PDRB yang lebih kecil dibandingkan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB daerah yang menjadi referensi.

Klasifikasi sektor PDRB menurut Tipologi Klassen dapat terlihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1
Klasifikasi Sektor Pembentuk PDRB Menurut Tipologi Klassen

Kontribusi Laju Pertumbuhan	$sk_i > sk$	$sk_i < sk$
$s_i > s$	Kuadran I Sektor yang maju dan tumbuh pesat (<i>developed sector</i>)	Kuadran III Sektor potensial atau masih dapat Berkembang (<i>developing sector</i>)
$s_i < s$	Kuadran II Sektor maju tapi tertekan (<i>stagnant sector</i>)	Kuadran IV Sektor relatif tertinggal (<i>underdeveloped sector</i>)

Sumber: Sjafrizal, 2008.

Keterangan:

s_i = Laju pertumbuhan sektor i di Kabupaten Mimika

s = Laju pertumbuhan sektor i di Provinsi Papua

sk_i = Nilai kontribusi sektor i terhadap PDRB di Kabupaten Mimika

sk = Nilai kontribusi sektor i terhadap PDRB di Provinsi Papua

2. Analisis *Location Quotient*

Untuk menentukan sektor basis digunakan Analisis *Location Quotient* (LQ). Metode ini merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam teori ekonomi basis. LQ adalah rasio dari peranan sektor di Kabupaten Mimika terhadap sektor yang sama di tingkat Provinsi Papua. Untuk menghitung LQ digunakan rumus sebagai berikut (Tarigan, 2005:78):

$$LQ = \frac{x_i/PDRB}{X_i/PNB}$$

Keterangan:

LQ = Indeks *Location Quotient*

x_i = Nilai tambah sektor i di Kabupaten Mimika

PDRB = Produk domestik regional bruto Kabupaten Mimika

X_i = Nilai tambah sektor i di Provinsi Papua

PNB = Produk domestik regional bruto Provinsi Papua

Berdasarkan persamaan di atas maka ada tiga kemungkinan nilai LQ yang akan diperoleh, yaitu:

- Nilai $LQ > 1$, artinya sektor i di Kabupaten Mimika berperan lebih besar daripada sektor yang sama di Provinsi Papua sehingga dapat dijadikan petunjuk bahwa Kabupaten Mimika surplus akan produk sektor i

dan mengekspornya ke daerah lain. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa Kabupaten Mimika memiliki keunggulan komparatif untuk sektor i tersebut.

b. Nilai $LQ < 1$, artinya sektor i di Kabupaten Mimika mempunyai peran lebih kecil dibandingkan peranan sektor tersebut di Provinsi Papua.

c. Nilai $LQ = 1$, menunjukkan bahwa produk yang dihasilkan sektor i di Kabupaten Mimika habis dikonsumsi oleh masyarakatnya sendiri.

Sektor dikatakan basis dan berpotensi sebagai penggerak perekonomian apabila nilai $LQ > 1$. Sebaliknya, sektor dikatakan non basis dan kurang berpotensi sebagai penggerak perekonomian apabila nilai $LQ < 1$.

3. Analisis *Shift Share*

Analisis *Shift Share* digunakan untuk menganalisis perubahan dan pergeseran sektor perekonomian di Kabupaten Mimika. Hasil analisis *Shift Share* akan menggambarkan kinerja sektor-sektor dalam perekonomian Kabupaten Mimika dibandingkan dengan Provinsi Papua.

Melalui analisis *Shift Share*, maka pertumbuhan ekonomi dan pola pergeseran struktural perekonomian suatu daerah ditentukan oleh tiga komponen, yaitu:

a. Komponen *Share* (*Provincial Share/PS*), merupakan

komponen kontribusi dari pertumbuhan ekonomi daerah acuan secara keseluruhan terhadap perekonomian daerah.

Komponen *Share* merupakan kondisi pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah acuan dalam periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam bentuk pertumbuhan PDRB. Nilai komponen *Share* menunjukkan tingkat pertumbuhan lokal yang terjadi jika diasumsikan ekonomi lokal tumbuh pada tingkat pertumbuhan yang sama dengan wilayah acuan. Komponen *Share* juga dianggap sebagai penggerak awal pertumbuhan ekonomi lokal yang disebabkan oleh pengaruh kontribusi pertumbuhan faktor regional.

Tapi pada kenyataannya pertumbuhan ekonomi lokal juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, sehingga terjadi simpangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang disebabkan faktor *share* tadi. Simpangan-simpangan yang terjadi terjadi terhadap faktor *share* akibat faktor-faktor spesifik sektoral dan faktor lokal yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dikenal dengan komponen *Shift* atau pergeseran.

b. Komponen *Shift*, menunjukkan simpangan yang terjadi terhadap nilai komponen *share* akibat

adanya faktor-faktor spesifik sektoral dan faktor-faktor lokal yang mempengaruhi ekonomi lokal yang bersangkutan. Nilai koreksi akan positif pada daerah yang ekonomi lokalnya bertambah makmur dalam periode analisis, sebaliknya nilai koreksi negatif pada ekonomi lokal yang mengalami kemunduran. Komponen *Shift* terdiri dari:

1) *Proportional Shift* (P). Komponen ini sering disebut sebagai komponen struktural atau bauran industri. Komponen ini mengukur nilai pergeseran komposisi sektoral yang terjadi di struktur ekonomi daerah acuan atau perbedaan antara pertumbuhan sektor-sektor secara individual dengan pertumbuhan ekonomi keseluruhan wilayah acuan. Komponen ini bernilai positif jika sektor-sektor di wilayah acuan mengalami pertumbuhan lebih pesat dari pertumbuhan keseluruhan ekonomi wilayah acuan, dan bernilai negatif jika sektor-sektor di wilayah acuan mengalami pertumbuhan lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di wilayah acuan.

2) *Differential Shift* (D). Komponen ini sering disebut sebagai kontribusi pertumbuhan lokal (*local share*). Besaran yang diukur oleh komponen ini adalah simpangan atau pergeseran di sektor lokal tertentu akibat terjadinya pertumbuhan yang lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan pertumbuhan sektor yang sama di wilayah acuan. Komponen ini bernilai positif jika sektor-sektor lokal yang berkembang lebih pesat dibandingkan sektor yang sama di wilayah acuan, dan bernilai negatif jika sektor lokal yang tingkat perkembangannya lebih rendah atau di bawah sektor yang sama di wilayah acuan. Besaran *differential shift* ini di dalam beberapa referensi sering disebut sebagai keunggulan kompetitif sektor ekonomi lokal.

Secara matematis, komponen *Provincial Share* (PS), *Proportional Shift* (P) dan *Differential Shift* (D) dapat diformulasikan sebagai berikut (Sjafrizal, 2008:91):

$$\begin{aligned} PS_{i,t} &= E_{r,i,t-n} (E_{N,t} / E_{N,t-n}) - E_{r,i,t-n} \\ P_{r,i,t} &= \{(E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n}) - (E_{N,t} / E_{N,t-n})\} \times E_{r,i,t-n} \\ D_{r,i,t} &= \{(E_{r,i,t} / E_{r,i,t-n}) - (E_{N,i,t} / E_{N,i,t-n})\} \times E_{r,i,t-n} \\ \Delta E_{r,i,t} &= PS_{i,t} + P_{r,i,t} + D_{r,i,t} \end{aligned}$$

Keterangan		$E_{N,t-n}$	= PDRB total Provinsi Papua tahun 2011
$E_{r,i,t-n}$	= PDRB sektor i Kabupaten Mimika tahun 2011	$E_{N,t}$	= PDRB total Provinsi Papua tahun 2015
$E_{r,i,t}$	= PDRB sektor i Kabupaten Mimika tahun 2015	$\Delta E_{r,i,t}$	= Total Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika
$E_{N,i,t-n}$	= PDRB sektor i Provinsi Papua tahun 2011	PS	= <i>Provincial Share</i>
$E_{N,i,t}$	= PDRB sektor i Provinsi Papua tahun 2015	P	= <i>Proportional Shift</i>
		D	= <i>Differential Shift</i>

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Klasifikasi Pertumbuhan Sektor Ekonomi di Kabupaten Mimika

Untuk mengetahui gambaran tentang klasifikasi pertumbuhan sektor ekonomi di Kabupaten Mimika yang dikaitkan dengan perekonomian Provinsi Papua

digunakan analisis Tipologi Klassen. Analisis Tipologi Klassen dilakukan dengan membandingkan laju pertumbuhan (s_i) dan kontribusi sektoral (sk_i) di Kabupaten Mimika dengan laju pertumbuhan (s) dan kontribusi sektoral (sk) di Provinsi Papua.

Tabel 1
Rata-Rata Laju Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Terhadap PDRB
Tanpa Sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Mimika dan
Provinsi Papua Tahun 2011 – 2015 (%)

Sektor Ekonomi	Laju Pertumbuhan		Kontribusi	
	Mimika	Papua	Mimika	Papua
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,69	6,19	14,64	11,74
Pertambangan dan Penggalian	-	1,92	-	43,14
Industri Pengolahan	4,22	4,14	1,18	2,03
Pengadaan Listrik dan Gas	5,28	5,00	0,10	0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,70	5,35	0,09	0,06
Konstruksi	8,69	11,26	16,22	9,98
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,99	8,69	16,28	7,68
Transportasi dan Pergudangan	7,28	9,17	8,30	3,94
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10,48	9,90	2,01	0,63
Informasi dan Komunikasi	6,09	8,71	14,19	3,56
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,18	7,91	3,64	1,44
Real Estate	6,79	8,91	4,92	2,29
Jasa Perusahaan	5,14	6,50	3,68	1,13
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,92	9,54	10,38	7,93
Jasa Pendidikan	5,33	8,69	1,47	1,99
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,50	8,94	1,18	1,43
Jasa Lainnya	8,51	8,78	1,73	1,00

Sumber: Data diolah, 2016.

Dari hasil analisis Tipologi Klassen, sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Mimika diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Sektor yang maju dan tumbuh pesat (*developed sector*). Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Mimika yang termasuk dalam klasifikasi sektor yang maju dan tumbuh pesat selama tahun 2011 – 2015 adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Hal ini berarti

sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Kabupaten Mimika mempunyai laju pertumbuhan dan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Papua.

b. Sektor maju tapi tertekan (*stagnant sector*). Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Mimika dalam kurun waktu 2011 – 2015 sebagian besar termasuk dalam

klasifikasi sektor ini. Adapun sektor-sektor tersebut adalah sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, serta sektor Jasa Lainnya. Hal ini berarti bahwa sektor-sektor tersebut di Kabupaten Mimika mempunyai laju pertumbuhan yang lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Papua, akan tetapi mempunyai kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Papua.

- c. Sektor potensial atau masih dapat berkembang (*developing*

sector). Sektor di Kabupaten Mimika yang diklasifikasikan sebagai sektor potensial adalah sektor Industri Pengolahan. Artinya bahwa sektor Industri Pengolahan di Kabupaten Mimika mempunyai laju pertumbuhan sektor yang lebih besar dibandingkan laju pertumbuhan sektor yang sama di Provinsi Papua, tetapi memiliki kontribusi sektoral yang lebih kecil dibandingkan dengan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Papua.

- d. Sektor relatif tertinggal (*underdeveloped sector*). Sektor-sektor di Kabupaten Mimika yang diklasifikasikan sebagai sektor relatif tertinggal adalah sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Ini artinya bahwa sektor-sektor tersebut di Kabupaten Mimika baik dari segi laju pertumbuhan maupun kontribusinya terhadap PDRB lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Papua.

Analisis Sektor Basis di Kabupaten Mimika

Berikut hasil perhitungan LQ Kabupaten Mimika tahun 2011 – 2015.

Tabel 2
Nilai LQ Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2015

Sektor	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-Rata	Ket.
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,32	1,25	1,25	1,20	1,21	1,25	Basis
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-	-	-
Industri Pengolahan	0,61	0,58	0,59	0,55	0,57	0,58	Non Basis
Pengadaan Listrik dan Gas	3,32	3,23	3,28	3,10	3,13	3,21	Basis
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,72	1,59	1,59	1,47	1,45	1,56	Basis
Konstruksi	1,85	1,61	1,58	1,55	1,57	1,63	Basis
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,25	2,12	2,13	2,06	2,05	2,12	Basis
Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,13	2,12	2,02	1,99	2,11	Basis
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,21	3,23	3,28	3,08	3,06	3,17	Basis
Informasi dan Komunikasi	4,44	4,07	3,94	3,78	3,78	4,00	Basis
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,79	2,48	2,53	2,43	2,45	2,54	Basis
Real Estate	2,40	2,12	2,11	2,07	2,07	2,15	Basis
Jasa Perusahaan	3,48	3,31	3,35	3,11	3,09	3,27	Basis
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,35	1,36	1,38	1,23	1,23	1,31	Basis
Jasa Pendidikan	0,83	0,75	0,74	0,70	0,69	0,74	Non Basis
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,88	0,81	0,83	0,80	0,81	0,83	Non Basis
Jasa Lainnya	1,82	1,73	1,71	1,69	1,69	1,73	Basis

Sumber: Data diolah, 2016.

Berdasarkan tabel di atas, nilai LQ Kabupaten Mimika dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 tanpa sektor Pertambangan dan Penggalian selama kurun waktu 2011 – 2015 menunjukkan dengan jelas sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan non basis. Sebagian besar sektor ekonomi di Kabupaten Mimika merupakan sektor basis, dan hanya terdapat tiga sektor yang merupakan sektor non basis. Sektor basis dengan perolehan nilai rata-rata LQ tertinggi yaitu sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 4,00. Sektor basis berikutnya yang memiliki nilai LQ yang tinggi setelah sektor Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Mimika berturut-turut adalah sektor Jasa Perusahaan dengan perolehan nilai LQ rata-rata sebesar 3,27, sektor Pengadaan Listrik dan Gas (3,21), sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (3,17), sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (2,54), sektor Real Estate (2,15), sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

(2,12), sektor Transportasi dan Pergudangan (2,11), sektor Jasa Lainnya (1,73), sektor Konstruksi (1,63), sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang (1,56), sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib (1,31), dan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (1,25).

Adapun sektor yang merupakan sektor non basis di Kabupaten Mimika selama periode analisis adalah sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan perolehan nilai LQ rata-rata adalah 0,83, sektor Jasa Pendidikan (0,74), dan sektor Industri Pengolahan (0,58).

Analisis Perubahan dan Pergeseran Sektor Ekonomi di Kabupaten Mimika

Hasil analisis *Shift Share* Kabupaten Mimika tahun 2011 – 2015 dengan menggunakan data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 tanpa sektor Pertambangan dan Penggalian sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 3
Analisis Shift Share Kabupaten Mimika Tahun 2011 – 2015 (Jutaan Rupiah)

Sektor	PS	P	D	ΔE
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	208.453,43	29.557,72	-21.097,55	216.913,60
Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-
Industri Pengolahan	17.419,89	-4.636,68	363,09	13.146,30
Pengadaan Listrik dan Gas	1.391,56	-170,32	60,26	1.281,50
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.314,54	-34,01	-661,14	619,40
Konstruksi	222.656,88	275.355,63	-128.677,01	369.335,50
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	220.174,24	146.004,23	-32.924,66	333.253,80
Transportasi dan Pergudangan	115.050,07	88.380,74	-46.276,11	157.154,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	25.452,63	23.576,47	3.156,80	52.185,90
Informasi dan Komunikasi	198.815,34	131.323,71	-107.173,25	222.965,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	51.198,80	24.665,73	-18.737,33	57.127,20
Real Estate	69.053,12	48.825,55	-31.067,07	86.811,60
Jasa Perusahaan	52.320,37	10.597,65	-14.194,53	48.723,50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	138.001,69	114.155,31	-18.891,81	233.265,20
Jasa Pendidikan	21.098,79	14.002,78	-14.649,97	20.451,60
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	16.137,31	11.609,20	-1.582,52	26.164,00
Jasa Lainnya	23.216,46	15.843,57	-1.370,02	37.690,00
Jumlah	1.381.755,14	929.057,28	-433.722,82	1.877.089,60

Sumber: Data diolah, 2016

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa selama kurun waktu 2011 – 2015, PDRB Kabupaten Mimika tanpa sektor Pertambangan dan Penggalian mengalami pertumbuhan (ΔE) sebesar 1.877.089,60 juta rupiah.

Nilai pertumbuhan PDRB yang positif ini berarti selama periode tersebut kinerja perekonomian Kabupaten Mimika mengalami peningkatan. Nilai komponen PS Kabupaten Mimika sebesar 1.381.755,14 juta rupiah berarti

Identifikasi Sektor Ekonomi Unggulan.....Abu Bakar

bahwa pertumbuhan PDRB Provinsi Papua memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika. Nilai komponen bauran industri (P) Kabupaten Mimika sebesar 929.057,28 juta rupiah mengindikasikan bahwa secara umum pertumbuhan PDRB sektoral di Provinsi Papua lebih besar dari pertumbuhan total PDRB Provinsi Papua, sehingga menyebabkan peningkatan pertumbuhan PDRB Kabupaten Mimika. Pengaruh daya saing (D) terhadap pertumbuhan PDRB tanpa sektor Pertambangan dan Penggalian Kabupaten Mimika berdasarkan hasil analisis *Shift Share* bernilai -433.722,82 juta rupiah yang mengindikasikan bahwa secara umum sektor-sektor di Kabupaten Mimika tumbuh lebih lambat dibandingkan sektor-sektor di Provinsi Papua yang menyebabkan sektor-sektor di Kabupaten Mimika tidak memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif. Meskipun demikian, secara sektoral dapat dilihat bahwa terdapat tiga sektor di Kabupaten Mimika yang memiliki nilai D yang positif, yaitu sektor Industri Pengolahan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Berdasarkan gabungan hasil analisis Tipologi Klassen, LQ dan Shift Share menunjukkan bahwa terdapat dua sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Mimika, yaitu sektor Pengadaan Listrik dan Gas, dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Kemampuan sektor Pengadaan Listrik dan Gas menjadi sektor unggulan karena selain sektor ini merupakan sektor basis, juga terklasifikasi sebagai sektor maju dan tumbuh pesat, serta memiliki keunggulan kompetitif. Kemampuan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi sektor unggulan karena selain sektor ini terklasifikasi sebagai sektor maju dan tumbuh pesat, dan merupakan sektor basis, juga memiliki keunggulan kompetitif dan terkonsentrasi pada sektor yang tumbuh cepat di Provinsi Papua.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sektor yang terklasifikasi sebagai sektor maju dan tumbuh pesat di Kabupaten Mimika adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Artinya, kedua sektor tersebut memiliki laju pertumbuhan dan kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan dan kontribusi sektor yang sama di Provinsi Papua.
2. Sektor-sektor yang merupakan sektor basis di Kabupaten Mimika adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sektor

Konstruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Transportasi dan Pergudangan, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, sektor Real Estate, sektor Jasa Perusahaan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, dan sektor Jasa Lainnya.

3. Sektor-sektor yang memiliki keunggulan kompetitif (D) di Kabupaten Mimika adalah sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.
4. Dengan menggabungkan hasil analisis Tipologi Klassen, Location Quotient, dan Shift Share, maka sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Mimika adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Mimika dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Mimika perlu diarahkan kepada pengembangan sektor

pengadaan listrik dan Gas serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang merupakan sektor ekonomi unggulan, dengan tidak mengesampingkan

pengembangan sektor-sektor lain sebagai pendukung. Prioritas pengembangan sektor ini diharapkan dapat menstimulus pembangunan perekonomian di Kabupaten Mimika, yang nantinya akan menarik

perkembangan/kemajuan sektor lain yang menjadi pendukungnya.

2. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebagai salah satu sektor basis yang memberikan kontribusi rata-rata terbesar di Kabupaten Mimika perlu dikembangkan lagi. Hal ini karena letak wilayah Kabupaten Mimika yang berpotensi menjadi daerah penyangga bagi kabupaten lainnya di wilayah pegunungan dan pantai di kawasan selatan dan timur Provinsi Papua.

3. Sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis pada saat ini diharapkan untuk ditingkatkan lagi agar tetap menjadi sektor basis pada masa mendatang, mengingat kontribusi dan laju pertumbuhan beberapa sektor basis tersebut menunjukkan trend yang menurun.

4. Sebagian besar sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Mimika saat ini tidak memiliki keunggulan kompetitif. Oleh

karena itu diperlukan kebijakan-kebijakan pembangunan yang tepat untuk dapat meningkatkan kinerja sektor-sektor tersebut di masa mendatang sehingga dapat menjadi sektor yang kompetitif, serta sebagai penggerak dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika.

5. Agar dapat meningkatkan kinerja sektor Jasa Pendidikan dan sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial yang saat ini tergolong dalam sektor yang relatif tertinggal, maka dibutuhkan kerjasama seluruh pihak dalam rangka menjamin ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, peningkatan mutu sumberdaya, serta pengelolaan yang efektif dan efisien, transparan dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2005. *Dasar-Dasar Ekonomi Wilayah*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- , 2008. *Ekonomi Archipelago*. Graha Ilmu, Yogyakarta
- Ambardi, U. M dan Socia Prihawantoro, 2002. *Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah*. Penerbit Pusat Pengkajian Kebijakan Teknologi Pengembangan Wilayah, Jakarta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan, Edisi 5*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- , 2005. *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah, Edisi Kedua*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mimika. 2015. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Mimika 2014 – 2019*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mimika 2015*.
- , 2015. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Mimika 2014*.
- , 2015. *Mimika Dalam Angka (Mimika Regency in Figures) 2015*.
- , 2016. *Mimika Dalam Angka (Mimika Regency in Figures) 2016*.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Papua. 2016. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua 2011 - 2015*.
- , 2015. *Produk Domestik*

- Regional Bruto (PDRB) Provinsi Papua 2010 - 2014.*
- de Fretes, J. J. T. 2013. *Analisis Sektor Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Tahun 2005-2010 (Kasus Pada Empat Kabupaten/Kota).* Tesis. Universitas Hasanuddin Makassar.
- Irawan dan Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan.* BPFE, Yogyakarta.
- Jhingan M.L. 2012. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.* PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah dan Kebijakan.* Penerbit UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Lantemona, A., Kalangi, JB dan Naukoko, A. 2014. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Kota Manado.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 14 (3), hal. 15-29.
- Mankiw, N. G. 2000. *Teori Makro Ekonomi, Edisi Keempat.* Erlangga, Jakarta.
- Munir, Badrul. 2002. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Edisi Pertama.* Bappeda Propinsi Nusa Tenggara Barat, Mataram.
- Narbuko, C., dan Achmadi, H. A. 2009. *Metodologi Penelitian.* Bumi Aksara, Jakarta.
- Nauw, A., Koleangan, A. M., dan Walewangko, E. N. 2015. *Analisis Perbandingan Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Sorong dan Kota Sorong.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 (4), hal. 160-170.
- Nikijuluw, J. B. 2013. *Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku.* Jurnal Ekonomi Cita Ekonomika Volume VII (2), hal. 196 – 203.
- Ponto, M., Kalangi, J. B., Luntungan, A. Y. 2015. *Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Jayapura.* Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 (2), hal. 1-20.
- Pujoalwanto, Basuki. 2014. *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris.* Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rachbini, Didik J. 2001. *Pembangunan Ekonomi & Sumber Daya Manusia.* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Rahmat. 2013. *Dimensi Strategis Manajemen Pembangunan.* Graha Ilmu, Yogyakarta
- Samuelson, P. A. dan Nordhaus, W. D. 2004. *Ilmu Makro Ekonomi.* PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Sirojuzilam. 2008. *Disparitas Ekonomi dan Perencanaan*

- Regional*. Penerbit Pustaka Bangsa, Medan
- Sjafrizal. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- . 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*, Penerbit Baduose Media: Sumatra Barat.
- Subandi. 2008. *Ekonomi Pembangunan*. Alfabeta, Bandung.
- Sukirno, Sadono. 2009. *Mikro Ekonomi: Teori Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- . 2006. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan, Cetakan Ketiga*. Penerbit Kencana, Jakarta.
- Supranto, J. 2009. *Statistik: Teori dan Aplikasi, Edisi Ketujuh*. Erlangga. Jakarta.
- Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tambunan. 2001. *Transformasi Ekonomi di Indonesia Teori dan Penemuan Empiris*. Salemba Empat, Jakarta.
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Todaro, M. P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga, Edisi Ketujuh*. Penerbit Airlangga, Jakarta.
- Todaro, M. P dan Smith, S. C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Erlangga. Jakarta.
- Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Widjaja, H. A. W. 2005. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Zakaria, Junaiddin. 2015. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.